

RENCANA KERJA (RENJA)

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan Sultan Hadiwijaya No. 4 Telp 0291-685790
DEMAK**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024.

Dalam rangka penyusunan dokumen Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak Tahun 2024 yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026; dan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah, bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut harus saling bersinergi mulai dari RPJPD, RPJMD, RENSTRA, RKPD dan Renja Perangkat Daerah. Salah satu dokumen dimaksud yang langsung disusun sesuai tupoksi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah adalah Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak Tahun 2024. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2024 berdasarkan prioritas RKPD tahun 2022 dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021-2026.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika ini disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 dengan memperhatikan isu-isu strategis dan permasalahan yang timbul saat ini, serta memuat rancangan program, kegiatan, sub kegiatan, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju tahun 2024 dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2024. dengan harapan penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 berlangsung dengan tertib, lancar dan mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan bersama.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	27
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	32
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD	33
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..	45
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	46
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	49
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1. Program dan Kegiatan	51
4.1.1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan Kegiatan	51
4.1.2. Rekapitulasi program dan kegiatan.....	51
4.1.3. Penjelasan rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan.....	53
4.2 Program Prioritas dan Rencana Implementasi	68

BAB V PENUTUP

5.1. Catatan Penting Yang Perlu Mendapatkan Perhatian ... 72

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan 72

5.3. Rencana Tindak Lanjut 73

L A M P I R A N

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Tahun 2024 dan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Tema pembangunan tahun 2024 disintesis dari visi RPJPD, tema RKP 2024, tema RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dan visi Bupati/Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada serentak 2020. Terdapat tiga kata kunci yang tersurat maupun tersirat dalam setiap visi/tema pembangunan, yaitu : kesejahteraan, kualitas sumber daya manusia dan pemulihan ekonomi. Berdasarkan hal tersebut, Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Demak ditetapkan dengan tema/fokus pembangunan tahunan sejak tahun 2022 hingga tahun 2026. Pada masing-masing tema/fokus disusun arah kebijakan pembangunan yang akan ditangani, untuk tema pembangunan tahun 2024 adalah

”PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PENGUATAN DAYA SAING EKONOMI BERBASIS POTENSI LOKAL”, Tema tersebut dipilih mengarah pada kebijakan penguatan ekonomi kerakyatan dilakukan melalui upaya-upaya penciptaan sentra-sentra ekonomi rakyat dan promosi komoditas unggulan daerah. Penguatan ekonomi kerakyatan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan secara regional dapat meningkatkan PDRB Kabupaten Demak. Potensi lokal yang dimaksud adalah lapangan usaha yang selama ini menjadi penggerak utama perekonomian daerah dan sektor lain yang berpotensi menyumbang kenaikan PDRB secara signifikan, yaitu lapangan usaha pertanian, perikanan, industri (termasuk UMKM) dan perdagangan. Potensi lainnya yaitu sektor pariwisata

yang menjadi penggerak lapangan usaha lainnya serta sektor teknologi informasi. Penguatan daya saing ekonomi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang salah satunya ditandai dengan penurunan tingkat kemiskinan dan angka pengangguran,

RKPD Kabupaten Demak tahun 2024 fokus pada peningkatan efektifitas capaian rencana pembangunan yang diarahkan terutama untuk : penuntasan program unggulan daerah tahun 2021-2026, penghapusan kemiskinan ekstrim, penurunan prevalensi stunting menjadi 15,12 % dan implementasi Satu Data Indonesia (SDI).

Dalam penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2024 mengacu pada implementasi Satu Data Indonesia (SDI) lebih fokus pada Penguatan Pembangunan TIK, Penguatan Jaringan FO Sektor 2, Penguatan Persandian Dan Keamanan Informasi, Meningkatkan Cakupan Analisis Data, dan Integrasi Single Data System (SDS) dan open data dengan aplikasi Satu Data Demak.

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak Tahun 2024 disusun melalui perencanaan yang melibatkan seluruh bidang yang ada. Masing- masing bidang wajib menyusun rencana kegiatan dengan mengembangkan analisa permasalahan pokok dan cara penyelesaian sesuai dengan target-target indikator program, kegiatan maupun sub kegiatan

Dalam persiapan penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi, menganalisis gambaran pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika, adalah sebagai berikut:

- a. Berpedoman pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dan mengacu pada rancangan awal RKPD;

- b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja Dinas Komunikasi dan Informatika didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif urusan komunikasi informatika, urusan statistik dan urusan persandian yang diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;
- c. Penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
- d. Rumusan program/kegiatan di dalam renja Dinas Komunikasi dan Informatika didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif urusan komunikasi informatika, urusan statistik dan urusan persandian yang diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;
- e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n + 1$.

Keterkaitan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak dengan dokumen RKPD dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Renja Perangkat Daerah merupakan masukan utama bagi dokumen RKPD, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, dan RPJMD, serta selanjutnya sebagai dokumen resmi Renja untuk proses penyusunan RKA Dinas Komunikasi dan Informatika, KUA, PPAS, dan RAPBD mempunyai kedudukan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan berfungsi menjabarkan Renstra (Rencana Strategis) ke dalam rencana pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan memuat arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 sebagai berikut ::

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;

13. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006-2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;

31. Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Demak;
32. Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak
33. Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
34. Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Sebagaimana tercantum pada pasal 7 ayat (1) dan pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dinyatakan bahwa Kepala Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan Tupoksi Perangkat Daerah serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, yang setiap tahunnya sebagai pedoman dalam pembuatan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Maksud penyusunan Renja adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024 dan tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dokumen tersebut sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA- Perangkat Daerah) Dinkominfo Kab. Demak.

Penyusunan Renja Tahun 2024 adalah untuk mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun

kedepan yang berisi program kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Kabupaten Demak.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2024 adalah :

1. Menjabarkan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 – 2026 dalam rencana program kegiatan;
2. Menjadi pedoman Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2024;
3. Menjadi acuan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024;
4. Mendorong dan menciptakan keterpaduan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika antar bidang dan antar tingkat pemerintahan dalam pengelolaan teknologi informatika;
3. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan terhadap alokasi sumber daya dalam pembangunan teknologi informasi; dan
4. Sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak Tahun 2024 disusun sesuai sistematika yang tercantum dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika Renja Perangkat Daerah

BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Menguraikan tentang kondisi pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Bab ini juga menguraikan evaluasi pelaksanaan Renja 2022

BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Memuat tentang telahaan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah serta program dan kegiatan

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Memuat Rencana Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak Tahun 2024 beserta kerangka pendanaannya.

BAB V : Penutup
Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

Program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2024 disusun berdasarkan evaluasi Rencana Kerja Tahun 2022 yang dilaksanakan sebagai upaya pencapaian 3 tujuan Renstra yaitu : Indeks Kepuasan Masyarakat, Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti dan Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika serta mencapai 5 sasaran Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti, Persentase indikator kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika yang mencapai target, Indeks Layanan SPBE, Indeks Keamanan Informasi dan Indeks tata kelola SPBE. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 mempunyai kebijakan pembangunan daerah tahun 2022 ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemulihan daya saing ekonomi. menitikberatkan pada Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang Menitikberatkan pada Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemulihan Daya Saing Ekonomi dan untuk peningkatan kualitas SDM yang sempat terkena dampak pandemi Covid-19 dan yang kemungkinan masih terasa dampaknya di tahun 2022.

Dengan memperhatikan hasil kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun sebelumnya, berbagai permasalahan dan isu strategis Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat, Belum Optimalnya Layanan dan Jangkauan Jaringan Telekomunikasi, Aplikasi-aplikasi E-Government belum Terintegrasi, Layanan Informasi dan Komunikasi Publik Belum Optimal, Belum Optimalnya Penggunaan Single Data System (SDS) dan Sistem Keamanan Informasi masih Rentan diretas serta kebijakan pembangunan daerah.

Arah kejakan tahun 2022 : Membangun aplikasi informasi publik terintegrasi, Diseminasi dan distribusi informasi melalui media

massa maupun media komunikasi lainnya serta kemitraan media. Menyusun Arsitektur SPBE, penguatan jaringan dengan Menyusun Arsitektur Infrastruktur SPBE, Implementasi Sertifikat Elektronik Pada Layanan Public, dan Meningkatkan ketersediaan data dan informasi sektoral melalui SDS dan open data untuk mendukung keterbukaan informasi. Untuk perwujudan pencapaian tujuan dengan target-target yang telah ditentukan dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan sehingga Pada tahun 2022, Dinas Komunikasi dan Informatika memperoleh penghargaan Tingkat Nasional dan Tingkat Jawa Tengah, Adapun 4 penghargaan Tingkat Nasional IT Wards Top Digital Awards sebagai berikut :

1. Top Digital Implementation 2022 # Stars 4
2. Top Leader On Digital Implementation 2022
3. Smart Living Gerakan Menuju Smart City
4. Outstanding Achievement (SP4N LAPOR)

Sedangkan Tingkat Jawa Tengah memperoleh 5 Penghargaan sbb :

- 1 Kabupaten Informatif
- 2 Kabupaten Peduli Penyiaran
- 3 Penyiar Radio Tervavorit
- 4 Juara 2 Penyiar Radio Wanita Terbaik
- 5 Juara 3 LPPL Radio RSKW FM

Pada penyusunan Renja 2024 di tahun berjalan ini, selain membahas tentang Evaluasi Renja Tahun 2022 juga memuat tentang Capaian Renja Tahun 2023 Semester 1 dan prakiraan capaian kinerja sampai dengan akhir tahun 2023 yang mengacu pada APBD murni TA 2023

Uraian Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika . Untuk mencapai indikator kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan dicapai dengan 5 program dan 11 kegiatan dan 29 Sub kegiatan dengan total anggaran murni sebesar Rp. 7.803.723.303,- (Tujuh Milyar Delapan Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Rupiah) terealisasi sebesar Rp. 7.560.185.069,- (Tujuh Milyard Lima Ratus Enam Puluh Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu enam Puluh Sembilan Rupiah) atau 96,88 %.

Sedangkan capaian kinerja Renja 2023 Semester 1 dalam pelaksanaan 3 urusan 5 (lima) Program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 44 (empat puluh empat) Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 8.841.923.492,- dengan realisasi sampai Semester 1 sebesar Rp 3.648.575.510,- atau 41,26 %. Sedangkan prakiraan capaian kinerja sampai akhir tahun 2023 rata-rata 100 % dan penyerapan anggaran sebesar 8.685.323.492,- (98,23 %)

Pembahasan diatas terjabarkan dalam 3 Urusan yaitu : Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian. Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan dengan 3 (tiga) program yaitu: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, dan Program Pengelolaan Aplikasi Informatika,

Adapun Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022, mengacu pada realisasi APBD dan hasil laporan kinerja tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak TA 2022 dan capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Renja Tahun 2023 RKPD Semester 1 dan prakiraan capaian kinerja sampai akhir tahun 2023 secara rinci sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kinerja Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah Kabupaten Demak bertujuan untuk Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dan Meningkatkan pelayanan publik Dinas Komunikasi dan Informatika.

Rencana Kerja Tahun 2022 pada program ini mempunyai 2 indikator kinerja program yaitu Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah yang Ditindaklanjuti dengan realisasi 100 % serta Indikator Persentase Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dengan realisasi 100 %. Kinerja program ini didukung oleh 6 kegiatan 6 indikator kegiatan dan 13 sub kegiatan 13 indikator sub kegiatan. Rata-rata tingkat ketercapaian hampir seluruh indikator kegiatan dan sub kegiatan tercapai 100 %, maka dapat diketahui tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan dan anggaran sebesar 95.90 % sangat tinggi yang artinya kegiatan yang dilakukan cukup tepat dalam mendukung kinerja program,

dengan anggaran sebesar Rp. 5.338.337.045,- meliputi 6 (enam) kegiatan dan 13 (tiga belas) sub kegiatan, adapun kegiatan sbb :

- a Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- b Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- c Administrasi Umum Perangkat Daerah
- d Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- e Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- f Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Keberhasilan pencapaian target kinerja Tahun 2022 (100 %) disebabkan dalam melaksanakan program kegiatan selalu mengutamakan atau melakukan komunikasi, koordinasi dan komunikasi baik lintas bidang maupun lintas perangkat daerah/vertical maupun lintas horizontal.

Strategi yang digunakan guna mengurangi hambatan dimasa mendatang adalah melakukan evaluasi tahun sebelumnya sebagai acuan penyusunan perencanaan penganggaran dan target-target kinerja untuk mendukung program kegiatan dalam mewujudkan tujuan Renstra.

Capaian Rencana Kerja Tahun 2023 Semester 1 pada program ini mempunyai 2 indikator kinerja program yaitu Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah yang Ditindaklanjuti dengan realisasi 100 % serta Indikator Persentase Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dengan realisasi 100 %. Kinerja program ini didukung oleh 7 (tujuh) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan. Pagu Program sebesar Rp 6.561.269.492,- dengan Realisasi Anggaran Program sebesar Rp 2.885.938.236,- maka dapat diketahui tingkat serapan anggaran sampai dengan Semester 1 sebesar 43.98 %. dan perkiraan capkin sampai akhir Tahun 2023 adalah 100 % Dan prakiraan penyerapan anggaran sampai dengan akhir Tahun 2023 sebesar Rp. 6.419.269.492,- (97,70 %)

Manfaat Penyelenggaraan Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota yaitu menjawab tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Demak dalam pencapaian pelayanan sesuai standar pelayanan dan monitoring Evaluasi terhadap rata-rata pencapaian kinerja sasaran

2. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Evaluasi Renja 2022 untuk Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik bertujuan untuk mendukung kebijakan pemerintah baik pusat maupun kabupaten dengan membuat penyusunan Strategi Komunikasi Publik meliputi menetapkan tujuan Meningkatkan pelayanan publik Dinas Komunikasi dan Informatika agar Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif, program ini menetapkan indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Tingkat Jawa Tengah, agar Jumlah Layanan Komunikasi dan informasi publik yang dikelola meningkat, indicator tersebut dengan target nilai angka 98,70 dengan realisasi 98,90 atau mencapai 100 %.

Dalam menyelenggarakan diseminasi pesan kebijakan dan mengevaluasi penggunaan media komunikasi ditempuh dengan 1 (satu) kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan 4 (empat) sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik, Pelayanan Informasi Publik, Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas dengan anggaran sebesar Rp. 1.384.900.000,- dengan realisasi pelaksanaan program sebesar Rp. 1.374.095.725,- atau mencapai 99,22 %.

Keberhasilan pencapaian target kinerja Tahun 2022 (100 %) disebabkan dalam melaksanakan program kegiatan selalu atau melakukan komunikasi, koordinasi dan komunikasi baik lintas bidang maupun lintas perangkat daerah/vertical maupun lintas horizontal dan melakukan komitmen bersama dengan OPD/lintas sektor terkait.

Tetapi meskipun target tercapai, namun dalam pelaksanaan ada beberapa permasalahan/hambatan dalam pencapaian target kinerja, diantaranya adalah Indikator Dalam Penilaian Website tidak diumumkan Oleh Komisi Informasi.

Strategi yang digunakan guna mengurangi hambatan dimasa

mendatang adalah melakukan Melakukan konsultasi ke Komisi Informasi ke Provinsi JawaTengah.

Capaian kinerja Rencana Kerja Tahun 2023 Semester 1 pada program ini mempunyai 1 (satu) indikator kinerja program yaitu Indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Tingkat Jawa Tengah dengan target Angka sebesar 98,80 dan di Semester 1 belum terealisasi karena penilaian dari KIP terlaksana di akhir tahun dan diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2023 terealisasi angka 98,88 tercapai 100 % sebagai Kabupaten Informatif. Kinerja program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan. Pagu Program ini sebesar Rp 1.085.799.000,- dengan Realisasi Anggaran Program sebesar Rp 312.336.500,- maka dapat diketahui tingkat serapan anggaran sampai dengan Semester 1 sebesar 28.77 %. Dan prakiraan penyerapan anggaran sampai dengan akhir Tahun 2023 sebesar Rp. 1.074.799.000,- (99,72 %)

Manfaat Penyelenggaraan Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yaitu memberikan pelayanan informasi dan komunikasi public terhadap masyarakat luas melalui media massa baik media cetak, media tatap muka, media online, media elektronik dan media social sesuai dengan perkembangan pembangunan dan pemerintahan di Kabupaten Demak

3. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

Program pengelolaan aplikasi informatika bertujuan untuk mendukung kebijakan pemerintah baik pusat maupun kabupaten dengan membuat penyusunan Strategi Komunikasi Publik meliputi menetapkan tujuan Meningkatkan kinerja pemerintahan berbasis elektronik dalam mendukung akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah agar Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) meningkat.

Renja 2022 pada Program ini menetapkan indikator Persentase aplikasi e-gov yang terintegrasi dengan portal Daerah dengan target 54,76 % realisasi 54,76 % capaian 100 %, Program ini diarahkan untuk meningkatkan Pengelolaan Aplikasi Informatika yang terintegrasi di Pemerintah Kabupaten Demak. Pelaksanaan program tersebut ditempuh melalui 2 kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp.

754.858.000,- terealisasi Rp. 751.356.159,- atau mencapai 99,54 %. terbagi pada 2 kegiatan sbb :

- a Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain diLingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sebesar Rp. 149.285.000,- terealisasi Rp. 148.315.410,- tercapai 99,35 %
- b Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sebesar Rp. 605.573.000,- teralisasi Rp. 603.040.749,- tercapai 99,58 %

Keberhasilan pencapaian target kinerja Tahun 2022 (100 %) disebabkan dalam melaksanakan program kegiatan selalu mengutamakan untuk melakukan komunikasi, koordinasi dan komunikasi baik lintas bidang maupun lintas perangkat daerah/vertical maupun lintas horizontal dan melakukan komitmen bersama dengan OPD/lintas sector terkait, meskipun target tercapai, namun dalam pelaksanaan ada beberapa permasalahan/hambatan dalam pencapaian target kinerja, diantaranya adalah Dalam pengadaan aplikasi masih belum disertai pembiatan API.

Strategi yang digunakan guna mengurangi hambatan dimasa mendatang adalah Dilakukan atau Menyarankan OPD untuk menganggarkan API setiap pemeliharaan aplikasi.

Capaian Rencana Kerja Tahun 2023 Semester 1 pada program ini mempunyai 1 (satu) indikator kinerja program yaitu Indikator Persentase Aplikasi E-Gov yang Terintegrasi dengan Portal Daerah dengan target sebesar 59,52 %. Sampai Semester 1, program ini terealisasi sebesar 54,76 %. Dan prakiraan capaian kinerja sampai dengan akhir Tahun 2023 terealisasi 59,52 %. (100 %), Kinerja program ini didukung dengan 2 (dua) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan. Pagu Program ini sebesar Rp 786.960.000,- dengan Realisasi Anggaran Program sebesar Rp 357.356.385,- maka dapat diketahui tingkat serapan anggaran sampai dengan Semester 1 sebesar 45.41 %. Dan prakiraan penyerapan anggaran sampai dengan akhir Tahun 2023 sebesar Rp. 833.960.000,- (99,64 %)

Manfaat Penyelenggaraan Program Pengelolaan Aplikasi Informatika yaitu peningkatan aplikasi e-gov yang terintegrasi

dengan portal Daerah dan pengembangan jaringan intranet untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan untuk mendukung program prioritas di pemerintah Kabupaten Demak.

Pada Urusan statistik dilaksanakan dengan 1 (satu) program (Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral) diuraikan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Rencana Kerja Tahun 2022 pada Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral bertujuan untuk mendukung kebijakan pemerintah baik pusat maupun kabupaten dengan membuat penyusunan Strategi Komunikasi Publik meliputi menetapkan tujuan Meningkatkan kinerja pemerintahan berbasis elektronik dalam mendukung akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah agar Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) meningkat Program ini menetapkan indikator Tingkat Ketersediaan Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi dengan target 100 % realisasi 100 % capaian 100 %,

Program ini diarahkan untuk meningkatkan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yaitu Data dalam Satu Data Demak yang memiliki metadata dengan proses Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral serta Membangun Metadata Statistik Sektoral melalui 1 (satu) kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota anggaran sebesar Rp. 57.715.800,- terealisasi Rp. 57.124.000,- capaian 98,97 % yang tersebar dalam 4 (empat) sub kegiatan.

Keberhasilan pencapaian target kinerja Tahun 2022 (100 %) disebabkan dalam melaksanakan program kegiatan selalu mengutamakan atau melakukan komunikasi, koordinasi dan komunikasi baik lintas bidang maupun lintas perangkat daerah/vertical maupun lintas horizontal.

Strategi yang digunakan guna mengurangi hambatan dimasa mendatang adalah melakukan evaluasi tahun sebelumnya sebagai acuan penyusunan perencanaan penganggaran dan target-target kinerja untuk mendukung program kegiatan dalam mewujudkan tujuan Renstra.

Capaian kinerja Rencana Kerja Tahun 2023 Semester 1 pada program ini mempunyai 1 (satu) indikator kinerja program yaitu Indikator Tingkat Ketersediaan Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi dengan target sebesar 100 %. Sampai Semester 1 (sat), program ini terealisasi sebesar 50 %. Kinerja program ini didukung dengan 1 (satu) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan. Pagu Program ini sebesar Rp 221.000.000,- dengan Realisasi Anggaran Program sebesar Rp 46.070.000,- maka dapat diketahui tingkat serapan anggaran sampai dengan Semester 1 sebesar 20,85 %. Dan prakiraan penyerapan anggaran sampai dengan akhir Tahun 2023 sebesar Rp. 220.700.000,- (99,86 %)

Manfaat Penyelenggaraan Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral yaitu menjawab tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan mendukung program prioritas di pemerintah Kabupaten Demak.

Pada Urusan Persandian didukung 1 (satu) program (Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi) 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Renja Tahun 2022 pada Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi bertujuan untuk mendukung kebijakan pemerintah baik pusat maupun kabupaten dengan membuat penyusunan Strategi Komunikasi Publik meliputi menetapkan tujuan Meningkatkan kinerja pemerintahan berbasis elektronik dalam mendukung akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah agar Meningkatnya kualitas keamanan informasi meningkat target 62,50 % realisasi 66,00 % capaian 105,60 %,

Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Persandian untuk meningkatkan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menetapkan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Menyediakan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ditempuh

melalui 1 (satu) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 39.700.000,- terealisasi Rp. 39.371.140,- tercapai 99,17 % tersebar pada 2 (dua) sub kegiatan.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah CSIRT Demakkab belum berjalan maksimal karena SDM Keamanan Siber belum ada, selain itu sarana dan prasarana keamanan informasi belum maksimal.

Solusi dengan adanya masalah ini yaitu dengan menutup celah kerawanan system elektronik, selalu update system operasi dan antivirus, monitoring lalu lintas pergerakan data anomaly.

Capaian Rencana Kerja Tahun 2023 Semester 1 pada program ini mempunyai 1 (satu) indikator kinerja program yaitu Indikator Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah dengan target sebesar 62,50 %. Sampai Semester 1, program ini terealisasi sebesar 68 % hal ini dapat disimpulkan bahwa program ini telah terlaksana dengan tepat dalam mendukung target kinerja program. Kinerja program ini didukung dengan 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan. Pagu Program ini sebesar Rp 186.895.000,- dengan Realisasi Anggaran Program sebesar Rp 46.874.389,- maka dapat diketahui tingkat serapan anggaran sampai dengan Semester 1 sebesar 25,08 %. Dan prakiraan penyerapan anggaran sampai dengan akhir Tahun 2023 sebesar Rp. 136.595.000,- (99,78 %)

Manfaat Penyelenggaraan Program Penyelenggaraan persandian untuk peningkatan keamanan informasi, mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan mendukung program prioritas di pemerintah Kabupaten Demak.

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan kinerja Renja Dinas Komunikasi dan Informatika dan pencapaian kinerja Renstra sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kabupaten Demak

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/	Target Kinerja Akhir Renstra 2021-2026		Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Akhir Renstra 2021-2026	
									Target tahun 2022	Realisasi tahun 2022	Tingkat Capaian (%) Tahun 2022	Realisasi s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian s/d tahun 2026 (%)
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9 = 7	10=(9/4)
					Nilai SAKIP Dinas komunikasi dan Informatika	Angka	84,54	82,04	82,54	81,35	96,23	81,35	96,23
					Persentase indikator kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika yang mencapai target	%	100	100	100	100	100	100	100
2,16	01,2			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	%	100	100	100	100	100	100	100
2,16	01,2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah	Dokumen	32	0	4	7	175	7	21,88
2,16	01,2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	0	4	7	175	7	70,00
2,16	01,2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan	Dokumen	65	42	79	76	96	76	116,92
2,16	01,2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	38	25	30	27	90	27	71,05
2,16	01,2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	27	17	50	49	98	49	181,48
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Komunikasi dan Informatika	Angka	90,14	95,71	90,10	90,20	100	90,20	100,07
2,16	01,2	05			Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	300	300	300	300,00
2,16	01,2	05	10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Pro- gram/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/	Target Kinerja Akhir Renstra 2021-2026		Realisasi Kinerja sampai dengan ta- hun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022			Realisasi Capaian Tar- get Akhir Renstra 2021-2026	
									Target tahun 2022	Realisasi tahun 2022	Tingkat Capaian (%) Ta- hun 2022	Realisasi s/d Ta- hun 2022	Tingkat Capaian s/d tahun 2026 (%)
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9 = 7	10=(9/4)
2,16	01,2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Uru- san Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Yang Tersedia	Lapora n	34	-	10	10	100	10	29,41
2,16	01,2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lapora n	30	-	6	6	100	6	20,00
2,16	01,2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lapora n	4	4	4	4	100	8	200,00
2,16	01,2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	Paket	301	-	105	109	104	104	34,49
2,16	01,2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	4	4	100	4	200,00
2,16	01,2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Per- engkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	47	-	8	8	100	8	17,02
2,16	01,2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0	-	3	3	100	3	#DIV/0!
2,16	01,2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Peng- gandaan yang Disediakan	Paket	31	-	15	16	107	16	51,61
2,16	01,2	06	09	Penyelenggaraan Rpat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	150	-	75	78	104	78	52,00
2,16	01,2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpelihara	unit	168	15	32	32	100	32	27,98
2,16	01,2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan DinasOp- erasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	13	12	12	12	100	12	92,31
2,16	01,2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau BangunanLainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Dire- habilitasi	unit	2	3	20	20	100	20	1150,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/	Target Kinerja Akhir Renstra 2021-2026		Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Akhir Renstra 2021-2026	
									Target tahun 2022	Realisasi tahun 2022	Tingkat Capaian (%) Tahun 2022	Realisasi s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian s/d tahun 2026 (%)
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9 = 7	10=(9/4)
2,16	01,2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi	Orang	1150	60	190	530	279	530	46,09
2,16	01,2	05	10	Sosialisasi peraturan Perundang-undang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	590	-	190	530	279	530	89,83
					Indeks SPBE	Angka	3,30	3,19	3,19	3,19	100	3,19	96,67
					Indeks tata kelola SPBE	Angka	3,15	3,25	3,00	3,25	108	3,25	103,17
,2.16	03,2			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase aplikasi e-gov yang terintegrasi dengan portal Daerah	%	73,80	53	54,76	54,76	100	54,76	74,20
,2.16	03,2	01		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah	OPD	41	41	41	41	100	41	100,00
,2.16	03,2	01	03	Penyeleenggaraan sistem Jaringan Intra Pemerintah daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	1	1	1	1	100	1	100,00
,2.16	03,2	02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi yang telah terintegrasi	Unit	19	-	2	2	100	2	10,53
,2.16	03,2	02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	41	2	20	20	100	22	53,66
,2.16	03,2	02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Dokumen	5	1	1	1	100	1	20,00
,2.16	03,2	02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	41	-	1	1	100	1	2,44

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/	Target Kinerja Akhir Renstra 2021-2026		Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022			Realisasi Capaian Target Akhir Renstra 2021-2026	
									Target tahun 2022	Realisasi tahun 2022	Tingkat Capaian (%) Tahun 2022	Realisasi s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian s/d tahun 2026 (%)
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9 = 7	10=(9/4)
,2.16	03,2	02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Dokumen	8	-	2	2	100	2	25,00
,2.16	03,2	02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Dokumen	5	0	1	2	200	2	40,00
					Indeks Layanan SPBE	Angka	3,30	3,85	3,00	3,85	128,33	3,85	116,67
,2.20	02,2			Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Tingkat Jawa Tengah	Angka	99,10	95,71	98,70	98,70	100	98,70	99,60
,2.20	02,2	01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komunikasi dan informasi publik yang dikelola	Layanan	5	5	5	6	120	6	120,00
,2.16	02,2	01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	16	0	10	10	100	10	62,50
,2.16	02,2	01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	12	-	7	7	100	7	58,33
,2.16	02,2	01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Dokumen	8	0	2	2	100	2	25,00
,2.16	02,2	01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Dokumen	4	-	1	1	100	1	25,00
,2.21	02,2			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tingkat Ketersediaan Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi	%	100	100	100	100	100	100	100,00
,2.20	02,2	01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah	Jumlah data dalam Satu Data yang memiliki metadata	Metadata	1000	100%	600	820	137	820	82,00
,2.20	02,2	01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Sektoral	Dokumen	5	-	1	1	100	1	20,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Pro- gram/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/	Target Kinerja Akhir Renstra 2021-2026		Realisasi Kinerja sampai dengan ta- hun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022			Realisasi Capaian Tar- get Akhir Renstra 2021-2026	
									Target tahun 2022	Realisasi tahun 2022	Tingkat Capaian (%) Ta- hun 2022	Realisasi s/d Ta- hun 2022	Tingkat Capaian s/d tahun 2026 (%)
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9 = 7	10=(9/4)
,2.20	02,2	01	02	Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Orang	246	0	82	82	100	82	33,33
,2.20	02,2	01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Metad- ta	1000	500	600	820	137	820	82,00
,2.20	02,2	01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Sektoral dari BPS	OPD	205	0	41	41	100	41	20,00
					Indeks Keamanan Informasi	Angka	3,00	1,00	1,70	2,00	118	2,00	66,67
,2.21	02,2			Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	%	92,00	50,00	62,50	66,00	106	66,00
,2.21	02,2	01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah	Lapora n	Lapora n	5	1	1	1	100	2
,2.21	02,2	01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Lapora n	9	0	3	5	167	5	55,56
,2.21	02,2	01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	OPD	41	41	41	41	100	41	100,00

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2022

NO	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	Indikator	Satuan	Data awal (2020)	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		Kode Subkegiatan
					Target	Anggaran	Realisasi Kinerja	Realisasi anggaran	Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(8/6)*100	11=(9/7)*100	12
	TOTAL					18.309.500	-	18.010.000	-	98.36 %	
2	PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS 'SMART CITY'					18.309.500		18.010.000	-	98.36 %	
a	Integrasi <i>e-government</i>	Jumlah kluster data yang terintegrasi	Kluster	-	-	-	4	-	100 %		2.16.03.2.02.07
1	Integrasi aplikasi kluster Kesehatan	Jumlah Aplikasi dalam kluster kesehatan	Unit	-	-	-	1	-	100 %		
2	Integrasi aplikasi kluster Kondisi Makro	Jumlah Aplikasi dalam kluster ekonomi makro	Unit	-	-	-	-	-	-		
3	Integrasi aplikasi kluster Keuangan Daerah	Jumlah Aplikasi dalam kluster keuangan daerah	Unit	-	-	-	1	-	100 %		
4	Integrasi aplikasi kluster Kesejahteraan	Jumlah Aplikasi dalam kluster kesejahteraan	Unit	-	-	-	1	-	100 %		
5	Integrasi aplikasi kluster Ekonomi Wilayah	Jumlah Aplikasi dalam kluster ekonomi wilayah	Unit	-	-	-	-	-	-		
6	Integrasi aplikasi kluster Pendidikan	Jumlah Aplikasi dalam kluster Pendidikan	Unit	-	-	-	1	-	100 %		
7	Integrasi aplikasi kluster Perumahan	Jumlah Aplikasi dalam kluster Perumahan	Unit	-	-	-	-	-	-		

8	Integrasi aplikasi kluster Infrastruktur	Jumlah Aplikasi dalam kluster Infrastruktur	Unit	-	-	-	-	-	-		
9	Integrasi aplikasi kluster TIK	Jumlah Aplikasi dalam kluster TIK	Unit	-	-	-	-	-	-		
e	Pengembangan <i>single database</i> (kebijakan satu data)	Jumlah data dalam Satu Data yang memiliki metadata	data	500	600	18.309.500	947	18.010.000	189 %	98.36 %	,2.20.02.2.01
1	Pengolahan data	Jumlah data dalam metadata yang dianalisis	data	-	600	18.309.500	820	18.010.000	136 %	98.36 %	
2	Pelatihan / Bimtek	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan	orang	-	-	-	84	-			2.20.02.2.01.03
3	Penyusunan database esipd	Jumlah database yang disusun	data/dokumen	-	-	-	1	-			
4	peningkatan kapasitas admin database	Jumlah admin yang dilatih	orang	-	-	-	41	-			

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menentukan skala penilaian kinerja, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak mempedomani Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Komunikasi dan Informatika di Kab/Kota.

Program/kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak tahun 2023 sebagian besar merupakan kelanjutan dari program dan kegiatan bidang Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2022 Kabupaten Demak, serta sebagian lagi merupakan kegiatan baru yang dilaksanakan sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Demak sekaligus sebagai wujud pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2021-2026.

Berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak, Dinas Komunikasi dan Informatika diberi tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian yang menjadi kewenangan Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas melaksanakan fungsi :

- a Perumusan kebijakan Bidang Urusan Informasi dan Komunikasi Publik, bidang urusan Statistik dan bidang urusan Persandian;
- b Pelaksanaan kebijakan Bidang Urusan Informasi dan Komunikasi Publik, bidang urusan Statistik dan bidang urusan Persandian;

- c Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan Bidang Urusan Informasi dan Komunikasi Publik, bidang urusan Statistik dan bidang urusan Persandian;
- d Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- e Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai tugas dan fungsinya.

Selanjutnya, sebagai alat pengukuran kinerja pelayanan Perangkat Daerah IKU (Indikator kinerja Utama), IKK (Indikator Kinerja Kunci) Outcome dan SDGs diambilkan dari target Renstra yang terangkum dalam Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak sebagaimana terlihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

NO	Indikator	IKU	SPM/ stand ar na- sional	SDGs	IKK Out- come	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	V	-	-	-	90,09	90,10	90,11	90,12	90,18	90,20	90,20	90,20	
2	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	V	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	V	-	-	-	82,04	82,54	83,04	83,54	81,35	81,35	83,54	83,54	
4	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika yang mencapai target	V	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Indeks SPBE	V	-	-	-	3,74	3,19	3,24	3,24	3,19	3,19	3,24	3,24	
6	Indeks Layanan SPBE	V	-	-	-	3,94	3,00	3,15	3,87	3,85	3,85	3,85	3,87	
7	Indeks Keamanan Informasi	V	-	-	-	n/a	1,70	2,20	2,25	1,00	2,00	2,20	2,25	
8	Indeks tata kelola SPBE	V	-	-	-	3,57	3,00	3,15	3,15	3,10	3,10	3,15	3,15	
9	Presentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo		-	-	V	100	100	100	100	100	100	100	100	
10	Presentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	-	-	-	V	53,00	54,76	59,52	64,28	43,00	54,76	59,52	64,28	

NO	Indikator	IKU	SPM/ stand ar na- sional	SDGs	IKK Out- come	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
11	Presentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten		-	-	V	88,80	92,38	94,23	96,12	98,04	92,38	94,23	96,12	
12	Presentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	-	-	-	V	100	100	100	100	100	100	100	100	
13	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah		-	-	V	100	100	100	100	100	100	100	100	
14	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	-	-	-	V	50,00	62,00	70,00	87,50	50,00	66,00	70,00	75,00	
15	Informasi tentang Sumber Daya yang tersedia untuk Pelayanan	-	-	-	V	2.519.004020.765,50	2.631.052.249.759,29	-	-	2.336.02.7813.338,00	2.487.342.627.299,00	-	-	
16	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	-	-	-	V	89	95	97	99	89	95	97	99	
17	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	-	-	V	-	71,17	72,92	74,36	75,85	72,92	72,92	74,36	75,85	
18	Persentase rumah tangga dengan akses internet	-	-	V	-	52,34	65,84	67,59	69,34	64,09	65,84	67,59	69,34	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh dabaikan.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persolan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Pemerintah Daerah di masa yang akan datang. Pokok permasalahan menjadi isu strategis yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dalam perencanaan Komunikasi dan informasi di Kabupaten Demak dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika.
- b. Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat.
- c. Belum optimalnya layanan dan jangkauan Jaringan Telekomunikasi
- d. Aplikasi-aplikasi e-Government belum terintegrasi.
- e. Layanan informasi dan komunikasi publik belum optimal
- f. Belum optimalnya penggunaan single data system (SDS).
- g. Sistem keamanan informasi masih rentan diretas.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 telah memuat Pendahuluan yang berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta mekanisme penulisan. Selain itu telah memuat evaluasi pelaksanaan renja tahun 2022 dan capaian kinerja tahun 2022 serta tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 disusun berdasarkan penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 dan Kepmendagri Nomor : 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah

Pada penyusunan Rancangan awal RKPD Tahun 2024 masih mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sedangkan pada saat penyusunan Renja TA 2024 setelah di analisa dan disandingkan dengan Kepmendagri Nomor : 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 terdapat beberapa perubahan/perbedaan sbb :

1. Jumlah sub kegiatan semula 30 sub kegiatan berubah menjadi 28 sub kegiatan ada pengurangan 2 sub kegiatan karena ada rasionalisasi anggaran, yaitu sub kegiatan pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan dan sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Total pagu anggaran pada rancangan awal sebesar Rp. 9.687.650.000,- Namun, pada proses penyusunan Renja Tahun 2024 ada rasionalisasi sehingga pagu anggaran menurun menjadi Rp. 9.032.164.600,-
3. Ada perubahan target Pada Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan indikator Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD semula target 3 dokumen berubah menjadi 2 Dokumen
4. Perubahan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD dengan indikator Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD semula target 0 dokumen berubah menjadi 1 dokumen

5. Perubahan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan indicator Administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi semula target 240 orang berubah menjadi 640 orang
6. Perubahan pada sub kegiatan Pengadaan Mebel dengan indicator jumlah paket mebel yang disediakan target 59 Unit berubah menjadi 16 Unit
7. Perubahan pada sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan indicator Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan target 17 Unit menjadi 1 unit
8. Perubahan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indicator jumlah BMD yang terpelihara target 54 Unit berubah menjadi 77 unit
9. Perubahan pada sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan indicator Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara target 40 unit berubah menjadi 20 unit
10. Perubahan pada sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan indicator Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi target 37 Unit berubah menjadi 23 unit

Berikut review rancangan akhir RKPD Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak sebagai berikut :

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kabupaten Demak

Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cata tan Penti ng
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ t capai an	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.701.850.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pelayanan sesuai Standar Pelayanan Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat yang ditindaklanjuti	100%	7.622.164.600	
1).	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				33.350.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah	10 Dokume n	18.000.000	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokume n	5.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokume n	4.000.000	
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kab. Demak	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokume n	9.350.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kab. Demak	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokume n	4.000.000	
3.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Demak	Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokume n	11.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Demak	Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokume n	4.000.000	Revisi 2 Dokum en
4.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokume n	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	0 Dokume n	2.000.000	Revisi 1 Dokum

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ t capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			en
5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Demak	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	5.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Demak	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	4.000.000	
2).	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.125.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Keuangan	78 Dokumen	5.012.164.600	
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Demak	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/ bulan	3.820.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Demak	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/ bulan	4.144.675.000	
2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	23 Dokumen	305.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	44 Dokumen	867.489.600	
3).	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				900.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi	240 orang	720.156.800	Revisi 640 orang
1.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Demak	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	70 Paket	80.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Demak	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	70 Paket	21.000.000	
2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	Kab. Demak	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	70 Orang	250.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	Kab. Demak	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	70 Orang	129.156.800	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ t capai an	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Fungsi		Pendidikan dan Pelatihan			Fungsi		Pendidikan dan Pelatihan			
3.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Demak	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang	570.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Demak	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	500 Orang	570.000.000	
4).	Administrasi Umum Perangkat Daerah				242.500.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Administrasi umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	60 Paket	131.224.120	
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Demak	Jumlah Paket Komponen Listrik InstalasiListrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Demak	Jumlah Paket Komponen Listrik InstalasiListrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.996.720	
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Demak	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	45.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Demak	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	27.468.500	
3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Demak	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	30.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Demak	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	10.458.000	
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Demak	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	25.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Demak	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	14.963.200	
5.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Demak	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	30.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Demak	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	6.050.000	
6.	Penyelenggaraan	Kab.	Jumlah Laporan	25	70.000.000	Penyelenggaraan	Kab.	Jumlah Laporan	25	53.000.00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ t capai an	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Demak	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Demak	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		
7.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	27.500.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	9.287.700	
5).	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				326.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah BMD yang disediakan	17 Unit	22.829.200	
1.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Demak	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Yang Disediakan	2 Unit	60.000.000						
2.	Pengadaan Mebel	Kab. Demak	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	86.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Demak	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	59 Unit	12.829.200	Revisi 16 Unit
3.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Demak	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	120.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Demak	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit	10.000.000	Revisi 1 Unit
4.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Demak	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	60.000.000						
6).	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.502.500.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jasa Penunjang Urusan Yang Tersedia	10 Laporan	1.502.500.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ t capai an	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Demak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	2.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Demak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	2.500.000	
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Demak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	1.500.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Demak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	1.500.000.000	
7).	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				572.500.000	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah BMD yang terpelihara	54 Unit	215.289.880	Revisi 77 unit
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Demak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	27.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Demak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.950.000	
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Demak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	110.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Demak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	85.957.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ t capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.	Pemeliharaan Mebel	Kab. Demak	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 Unit	20.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Demak	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 Unit	3.437.880	
4.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Demak	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	27.500.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Demak	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	14.200.000	Revisi 20 Unit
5.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Demak	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	110.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Demak	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	29.294.800	
6.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Demak	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10 Unit	27.500.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Demak	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi	37 Unit	17.680.000	Revisi 23 unit
7.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Demak	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	250.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Demak	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	24.770.200	
B.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				563.500.000	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Tingkat Jawa Tengah	98,90 Angka	700.000.000	
1)	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota				563.500.000	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Layanan Komunikasi dan informasi publik yang dikelola	6 Layanan	700.000.000	
1.	Pengelolaan Media	Kab.	Jumlah Dokumen Hasil	4	305.000.000	Pengelolaan Media	Kab.	Jumlah Dokumen Hasil	4	318.995.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ t capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Komunikasi Publik	Demak	Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen		Komunikasi Publik	Demak	Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen		
2.	Pelayanan Informasi Publik	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	3 Dokumen	55.000.000	Pelayanan Informasi Publik	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	3 Dokumen	55.029.000	
3.	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	2 Dokumen	33.000.000	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	2 Dokumen	59.561.000	
4.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	1 Dokumen	170.500.000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	1 Dokumen	266.415.000	
C.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				1.059.300.000	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		Persentase aplikasi e-gov yang terintegrasi dengan portal Daerah	64,28 %	410.000.000	
1).	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				440.000.000	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah	41 OPD	133.555.000	
1.	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kab. Demak	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 Unit	440.000.000	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kab. Demak	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 Unit	133.555.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ t capai an	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2).	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					Pengelolaan E-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah aplikasi yang telah terintegrasi	2 Unit	276.445.000	
1.	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kab. Demak	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	30 Unit	385.000.000	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kab. Demak	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	30 Unit	110.258.000	
2.	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen	49.500.000	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota cerdas	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen	84.243.000	
3.	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	41 Dokumen	91.300.000	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	41 Dokumen	31.738.000	
4.	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	2 Dokumen	49.500.000	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	2 Dokumen	13.122.000	
5.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	44.000.000	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	37.084.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ t capai an	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
D.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				220.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Tingkat Ketersediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi	100%	150.000.000	
1).	Penyelenggaraan Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				220.000.000	Penyelenggaraan Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah data dalam Satu Data yang memiliki metadata Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan Daerah	800 Dokumen	150.000.000	
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Sektoral	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pengumpul SinkronisasiPengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	55.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Sektoral	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pengumpul SinkronisasiPengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	77.023.500	
2.	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Daerah yang Terintegrasi	Kab. Demak	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	41 Orang	55.000.000	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Daerah yang Terintegrasi	Kab. Demak	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	41 Orang	40.431.500	
3.	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kab. Demak	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	800 Dokumen	55.000.000	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kab. Demak	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	2500 Dokumen	19.745.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targ t capai an	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Targe t capai an	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sektoral	Kab. Demak	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	41 Orang	55.000.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sektoral	Kab. Demak	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	41 Orang	12.800.000	
E.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				143.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Tingkat keamanan informasi pemerintah	75%	150.000.000	
1).	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				143.000.000	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah	1 Laporan	150.000.000	
1.	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Demak	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	88.000.000	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Demak	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	81.191.000	
2.	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	41 Perangkat Daerah	55.000.000	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	41 Perangkat Daerah	68.809.000	
TOTAL					9.687.650.000					9.032.164.600	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan propinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang urusan Komunikasi dan informasi, yang mendukung bidang urusan Statistik dan persandian dapat mendukung semua program kegiatan yang ditetapkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Demak Tahun 2024.

Dinas Komunikasi dan informatika mendapatkan usulan Pokir dari DPRD Kab. Demak sehingga data usulan Pokir, pada Renja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024 Kabupaten Demak

No	Program/Ke giatan/Sub Kegiatan/Pe kerjaan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Anggaran	Catat an
1	2	3	4	5	6	7
1	Advetorial Media	Demak	Jumlah advetorial yang disampaikan melalui media	1 Paket	200.000.000	Diteri ma
2	Publikasi Media Cetak	Demak	Jumlah infor- masi yang disampaikan melalui media cetak	1 Paket	200.000.000	Diteri ma

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2024 disusun dengan mengacu pada agenda pembangunan nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020—2024. Selain itu, juga mengacu pada **“perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) global dengan memasukkan unsur-unsur perkembangan teknologi di dalam melakukan peta strategi pengelolaan, penyelenggaraan, hingga pemanfaatan di bidang TIK”**.

Dengan terjadinya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 hingga sekarang, telah mendorong kebutuhan digitalisasi nasional menjadi semakin krusial. Pada era new normal, kebutuhan koneksi internet yang memadai menjadi kebutuhan primer masyarakat. Para pelaku usaha, industri dan sektor ekonomi terdesak untuk bertransformasi digital agar bisnisnya dapat terus beroperasi. Situasi ini mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk mendorong percepatan penyediaan infrastruktur TIK dan percepatan transformasi digital nasional pada 5 (lima) tahun ke depan sedangkan Sasaran Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika, dalam mewujudkan tujuan di atas, Kemenkominfo menetapkan sasaran strategis pembangunan bidang komunikasi dan informatika untuk tahun 2020 – 2024 sebagai berikut :

1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;
2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;
3. Meningkatnya konektivitas layanan pos;
4. Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional;
5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika;
6. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis;
7. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital;
8. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah;

9. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan
10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan Rencana strategis Kementrian yang mendukung pembangunan di Kabupaten Demak dengan tujuan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih, maka program dari Renstra Kementrian Komunikasi dan Informatika Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten, Program Pemanfaatan TIK, Program Komunikasi Publik dan Dukungan Manajemen di Kabupaten Demak adalah program aplikasi informatika, program informasi dan komunikasi publik, program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi dan program penyelenggaraan statistik sectoral.

Rencana Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020—2024 mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, Kementrian Komunikasi dan Informatika akan berupaya menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika yang handal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: **“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong.”**

Misi Kementrian Komunikasi dan Informatika sesuai dengan perannya, Kemenkominfo dapat mendukung pelaksanaan misi Presiden dan Wakil Presiden melalui tugasnya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Dengan demikian, Kemenkominfo akan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;
2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;

3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi dan hubungan kelembagaan; dan
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Komunikasi dan Informatika

Selain mengacu pada visi dan misi Kementerian Kominfo tahun 2020-2024, rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023 juga mengacu pada visi Provinsi Jawa Tengah

“Jawa Tengah Berdikari dan Semakin Sejahtera (tetep) Mboten Korupsi Mboten Ngapusi”.

Provinsi Jawa Tengah menetapkan 12 sasaran untuk mewujudkan visi-misi Jateng 2024, yaitu:

- a. Terciptanya kohesi sosial masyarakat;
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
- c. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan;
- d. Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik;
- e. Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin terutama penduduk miskin pedesaan, dan kelompok rumah tangga desil terbawah;
- f. Menurunnya pengangguran terbuka;
- g. Meningkatnya pertumbuhan sector unggulan daerah disertai kesejahteraan petani dan peran investasi terhadap ekonomi daerah;
- h. Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat secara luas;
- i. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
- j. Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender;
- k. Meningkatnya kualitas air, udara, serta tutupan lahan;
- l. Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja, perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan

tuntutan mampu bersaing dibidang Urusan Komunikasi dan informatika, bidang urusan statistik dan bidang urusan persandian, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara output dengan outcome.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD Kabupaten Demak sebagai gambaran tentang kontribusi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu Bupati dalam mencapai visi dan misi bidang urusan Komunikasi dan Informatika, bidang urusan statistik dan bidang urusan persandian.

Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika. Adapun tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika untuk periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tujuan :

1. Meningkatkan pelayanan publik Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Demak;
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Demak; dan
3. Meningkatkan kinerja pemerintahan berbasis elektronik dalam mendukung akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah

Sasaran :

Dalam rangka mencapai tujuan, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah :

- 1. Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 2. Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif;
- 3. Meningkatnya Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- 4. Meningkatnya kualitas keamanan informasi; dan
- 5. Meningkatnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Adapun Target Tujuan dan Sasaran tahun 2024 adalah sbb :

TABEL 3.2
TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR (Satuan)	Satuan	2024
					Target
1	Meningkatkan Pelayanan Publik Dinas Komunikasi dan Informatika		Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	90,12
2		Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsive	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100
3	Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika		Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	Angka	83,54
4		Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika yang mencapai target	%	100
5	Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Mendukung Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah		Indeks SPBE	Angka	3,24
6		Meningkatnya Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Layanan SPBE	Angka	3,87
7		Meningkatnya kualitas keamanan informasi	Indeks Keamanan Informasi	Angka	2,25
8		Meningkatnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks tata kelola SPBE	Angka	3,15

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

4.1.1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program adalah tugas Dinas Komunikasi dan informatika pada urusan bidang Komunikasi dan informatika, bidang urusan statistik dan bidang urusan persandian, meskipun bukan urusan dasar namun hal ini menjadi pilihan penting untuk mendukung tercapainya visi dan misi bupati dalam tugas pelayanan masyarakat kabupaten Demak.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan secara rinci adalah:

- a. Target Visi Bupati Demak untuk mewujudkan Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera.
- b. Target Misi Bupati Demak untuk mewujudkan Misi ke 1 yaitu : “Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, serta Kehidupan Bermasyarakat yang Agamis, Kondusif dan Berbudaya”
- c. Pencapaian Target Sustainable Development Goals (SDGs) tahun 2024
 - 1) Proporsi individu yang menggunakan telepon genggam target 72.92 % realisasi 72,92 % capaian 100 %
 - 2) Proporsi rumah tangga dengan akses internet sebesar target 65.84 % realisasi 65.84 % capaian 100 %

4.1.2 Rekapitulasi program dan kegiatan

Secara Garis besar rekapitulasi Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri atas 5 Program antara lain meliputi : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Program Penyelenggaraan Statistik Sektor dan

Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi. Program-program tersebut di dukung dengan 12 kegiatan dan 30 Sub kegiatan, adapun kegiatan d program umum ada 7 kegiatan, sedangkan 5 (lima) kegiatan pada bidang teknis antara lain : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah dan kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan tersebut tersebar ke berbagai kawasan di wilayah Kabupaten Demak terfokus pada media massa, jaringan intranet untuk keperluan hubungan antar perangkat daerah, media sosial sebagai alat komunikasi masyarakat dengan pemerintah, media luar ruang, media cetak dan media elektronik sebagai informasi dan desiminasi informasi kepada masyarakat.

Untuk mendukung Tujuan dan sasaran Rentra Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama, Indikator kinerja Program, indicator Kegiatan dan indicator sub kegiatan pada rancangan akhir RKPD membutuhkan anggaran sebesar Rp. 9.032.164.600,- pada Program Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota digunakan untuk Kegiatan rutin kantor juga untuk Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang penegakan hukum cukai rokok illegal yang didanai oleh DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) sebagai penunjang program pengelolaan informasi dan komunikasi publik seperti media massa untuk kegiatan jasa advertorian media cetak dan media online dan program pengelolaan aplikasi informatika untuk kegiatan pemeliharaan aplikasi cengkeraman mata elang dan jasa konsultasi proses bisnis (SPBE)

4.1.3. Penjelasan rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan

Dengan diberlakukannya Kepmendagri Nomor : 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, yang terbitnya setelah penyusunan rancangan awal RKPD, sehingga berdampak pada penyusunan Rancangan Akhir, dan ketika dicermati kembali banyak terdapat ketidaksesuaian terutama pada indikator dan satuan sub kegiatan maka Perlu disesuaikan Kembali dalam penyusunan Rancangan akhir baik jenis program, kegiatan, sub kegiatan, dengan berubahnya indikator dan satuan sub kegiatan otomatis harus merubah target serta pagu indikatif.

Ada beberapa sub kegiatan yang pada waktu rancangan awal RKPD pada kegiatan rutin Dinas Komunikasi dan Informatika belum terakomodor sehingga dalam penyusunan Renja Tahun 2024 ini ada beberapa yang perlu disesuaikan agar dalam pelaksanaan kegiatan dapat mendukung capaian kinerja sekaligus menjawab sasaran dan tujuan

Adapun rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan seperti tabel berikut ini :

Tabel 4.1.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PRO- GRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PRO- GRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR- GET AKHIR PERI- ODE RENST RA OPD	REAL- ISASI CA- PAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRA- KIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TA- HUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KE- LOMPO K SASA- RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							TAR- GET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR- GET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NA- SIONA L	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						9.032.164.600,00							11.637.673.492,00
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.410.000.000,00							3.805.800.000,00
	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMU- NIKASI DAN INFORMATIKA						1.110.000.000,00							3.247.800.000,00
1.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUB- LIK	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Tingkat Jawa Tengah	-			98,90 Angka	700.000.000,00						-	1.038.500.000,00
	2.16.02.2. 01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komunikasi dan informasi publik yang dikelola	-			6 Layan an	700.000.000,00			-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	-	1.038.500.000,00
	2.16.02.2. 01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PRO- GRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PRO- GRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR- GET AKHIR PERI- ODE RENST RA OPD	REAL- ISASI CA- PAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRA- KIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TA- HUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KE- LOMPO K SASA- RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							TAR- GET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR- GET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NA- SIONA L	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengel- olaan Media Komunikasi Publik				4 Doku- men	318.995.000,00	Kab. De- mak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALO- KASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-		505.000.000,00
	2.16.02.2. 01.0006	Pelayanan Informasi Publik													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				3 Doku- men	55.029.000,00	Kab. De- mak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALO- KASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-		55.000.000,00
	2.16.02.2. 01.0011	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kel- ola Komisi Informasi di Daerah				2 Doku- men	59.561.000,00	Kab. De- mak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALO- KASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-		158.000.000,00
	2.16.02.2. 01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas													
			Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan In- formasi Program atau Ke- bijakan				1 Doku- men	266.415.000,00	Kab. De- mak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALO- KASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-		320.500.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PRO- GRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PRO- GRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR- GET AKHIR PERI- ODE RENST RA OPD	REAL- ISASI CA- PAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRA- KIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TA- HUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KE- LOMPO K SASA- RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							TAR- GET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR- GET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NA- SIONA L	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN AP- LIKASI INFORMATIKA	Persentase aplikasi e-gov yang terintegrasi dengan portal Daerah	-			64,28 %	410.000.000,00						-	2.209.300.000,00
	2.16.03.2. 01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Ling- kup Pemerintah Dae- rah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah	-			41 OPD	133.555.000,00			-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	-	1.490.000.000,00
	2.16.03.2. 01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah													
			Jumlah Sistem Jarin- gan Intra Pemerintah Daerah				1 Unit	133.555.000,00	Kab. De- mak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana trans- fer Umum Dana Alo- kasi Umum Bantuan Keuangan khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-		1.490.000.000,00
	2.16.03.2. 02	Pengelolaan E-govern- ment di Lingkup Pemerintah Daerah Kabu- paten/Kota	Jumlah aplikasi yang telah terintegrasi	-			2 Unit	276.445.000,00			-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	-	719.300.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PRO- GRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PRO- GRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR- GET AKHIR PERI- ODE RENST RA OPD	REAL- ISASI CA- PAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRA- KIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TA- HUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KE- LOMPO K SASA- RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							TAR- GET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR- GET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NA- SIONA L	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.16.03.2. 02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik													
			Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				30 Unit	110.258.000,00	Kab. De- mak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALO- KASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-		385.000.000,00
	2.16.03.2. 02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas													
			Jumlah Dokumen Pro- gram Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City				1 Doku- men	84.243.000,00	Kab. De- mak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALO- KASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-		149.500.000,00
	2.16.03.2. 02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah													
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengem- bangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Infor- masi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				41 Doku- men	31.738.000,00	Kab. De- mak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALO- KASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-		91.300.000,00
	2.16.03.2. 02.0011	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PRO- GRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PRO- GRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR- GET AKHIR PERI- ODE RENST RA OPD	REAL- ISASI CA- PAIAN RENJA OPD TA- HUN 2022	PRA- KIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TA- HUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KE- LOMPO K SASA- RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							TAR- GET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR- GET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NA- SIONA L	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Govern- ment Chief Information Of- ficer (GCIO)				2 Doku- men	13.122.000,00	Kab. De- mak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALO- KASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-		49.500.000,00
	2.16.03.2. 02.0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE													
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE				1 Doku- men	37.084.000,00	Kab. De- mak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-		44.000.000,00
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						150.000.000,00							315.000.000,00
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENG- GARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tingkat Ketersediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi	-			100 %	150.000.000,00						-	315.000.000,00
	2.20.02.2. 01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dalam Satu Data yang mem- iliki metadata Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	-			800 Doku- men 0 OPD	150.000.000,00			-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	-	315.000.000,00
	2.20.02.2. 01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PRO- GRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PRO- GRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR- GET AKHIR PERI- ODE RENST RA OPD	REAL- ISASI CA- PAIAN RENJA OPD TA- HUN 2022	PRA- KIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TA- HUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KE- LOMPO K SASA- RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							TAR- GET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR- GET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NA- SIONA L	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				1 Dokumen	77.023.500,00	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-		110.000.000,00
	2.20.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi													
			Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi				41 Orang	40.431.500,00	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-		65.000.000,00
	2.20.02.2.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral													
			Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun				2500 Dokumen	19.745.000,00	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-		85.000.000,00
	2.20.02.2.01.0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral													
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS				41 Orang	12.800.000,00	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-		55.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PRO- GRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PRO- GRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR- GET AKHIR PERI- ODE RENST RA OPD	REAL- ISASI CA- PAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRA- KIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TA- HUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KE- LOMPO K SASA- RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							TAR- GET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR- GET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NA- SIONA L	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSAN- DIAN						150.000.000,00							243.000.000,00
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENG- GARAAN PERSANDIAN UN- TUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah	-			75 %	150.000.000,00						-	243.000.000,00
	2.21.02.2. 01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Infor- masi Pemerintah Dae- rah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelenggaraan per- sandian untuk penga- manan informasi pemerintah daerah	-			0 0 1 Lapor an	150.000.000,00			-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	-	243.000.000,00
	2.21.02.2. 01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kea- manan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Ber- basis Elektronik dan Non Elektronik				1 Lapor an	81.191.000,00	Kab. De- mak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-		163.000.000,00
	2.21.02.2. 01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PRO- GRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PRO- GRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR- GET AKHIR PERI- ODE RENST RA OPD	REAL- ISASI CA- PAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRA- KIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TA- HUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KE- LOMPO K SASA- RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							TAR- GET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR- GET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NA- SIONA L	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				41 Peran gkat Dae- rah	68.809.000,00	Kab. De- mak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-		80.000.000,00
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.477.489.600,00							3.832.074.000,00
	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMU- NIKASI DAN INFORMATIKA						3.477.489.600,00							3.832.074.000,00
1.	2.16.01	PROGRAM PENUN- JANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pela- yanan sesuai standar Pelayanan Persentase rekomen- dasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat yang ditindaklanjuti	-			100 % 100 %	3.477.489.600,00						-	3.832.074.000,00
	2.16.01.2. 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah	-			10 Doku- men	18.000.000,00			-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	-	33.350.000,00
	2.16.01.2. 01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PRO- GRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PRO- GRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR- GET AKHIR PERI- ODE RENST RA OPD	REAL- ISASI CA- PAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRA- KIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TA- HUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KE- LOMPO K SASA- RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							TAR- GET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR- GET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NA- SIONA L	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Doku- men	4.000.000,00	Kab. De- mak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-		5.500.000,00
	2.16.01.2. 01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordi- nasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Doku- men	4.000.000,00	Kab. De- mak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-		9.350.000,00
	2.16.01.2. 01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordi- nasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				3 Doku- men	4.000.000,00	Kab. De- mak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-		11.000.000,00
	2.16.01.2. 01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													
			Jumlah Dokumen Pe- rubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD				0 Doku- men	2.000.000,00	Kab. De- mak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-		2.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PRO- GRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PRO- GRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR- GET AKHIR PERI- ODE RENST RA OPD	REAL- ISASI CA- PAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRA- KIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TA- HUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KE- LOMPO K SASA- RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							TAR- GET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR- GET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NA- SIONA L	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.16.01.2. 01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			<i>Jumlah Laporan Ca- paian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordi- nasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				3 Lapor an	4.000.000,00	Kab. De- mak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-		5.500.000,00
	2.16.01.2. 02	Administrasi Keu- angan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Keu- angan</i>	-			78 Doku- men	867.489.600,00			-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	-	220.224.000,00
	2.16.01.2. 02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Ad- ministrasi Pelaksa- naan Tugas ASN</i>				44 Doku- men	867.489.600,00	Kab. De- mak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-		220.224.000,00
	2.16.01.2. 05	Administrasi Kepega- waian Perangkat Daerah	<i>Administrasi kepega- waian perangkat dae- rah yang terpenuhi</i>	-			240 Orang	720.156.800,00			-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	-	980.000.000,00
	2.16.01.2. 05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PRO- GRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PRO- GRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR- GET AKHIR PERI- ODE RENST RA OPD	REAL- ISASI CA- PAIAN RENJA OPD TA- HUN 2022	PRA- KIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TA- HUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KE- LOMPO K SASA- RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							TAR- GET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR- GET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NA- SIONA L	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				70 Pa- ket	21.000.000,00	Kab. De- mak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-		160.000.000,00
	2.16.01.2. 05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				70 Orang	129.156.800,00	Kab. De- mak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-		250.000.000,00
	2.16.01.2. 05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				500 Orang	570.000.000,00	Kab. De- mak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEBBAKAU (CHT)	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-		570.000.000,00
	2.16.01.2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	-			60 Pa- ket	131.224.120,00			-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	-	272.500.000,00
	2.16.01.2. 06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PRO- GRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PRO- GRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR- GET AKHIR PERI- ODE RENST RA OPD	REAL- ISASI CA- PAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRA- KIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TA- HUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KE- LOMPO K SASA- RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							TAR- GET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR- GET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NA- SIONA L	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Kompo- nen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Pa- ket	9.996.720,00	Kab. De- mak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-		15.000.000,00
	2.16.01.2. 06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Pa- ket	27.468.500,00	Kab. De- mak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-		45.000.000,00
	2.16.01.2. 06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Pa- ket	10.458.000,00	Kab. De- mak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-		30.000.000,00
	2.16.01.2. 06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Peng- gandaan yang Dise- diakan				4 Pa- ket	14.963.200,00	Kab. De- mak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-		25.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PRO- GRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PRO- GRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR- GET AKHIR PERI- ODE RENST RA OPD	REAL- ISASI CA- PAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRA- KIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TA- HUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KE- LOMPO K SASA- RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							TAR- GET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR- GET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NA- SIONA L	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.16.01.2. 06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				12 Lapor an	6.050.000,00	Kab. De- mak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-		30.000.000,00
	2.16.01.2. 06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				25 Lapor an	53.000.000,00	Kab. De- mak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-		100.000.000,00
	2.16.01.2. 06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				1 Doku- men	9.287.700,00	Kab. De- mak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-		27.500.000,00
	2.16.01.2. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penun- jang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah BMD yang disediakan</i>	-			17 Unit	22.829.200,00			-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	-	221.000.000,00
	2.16.01.2. 07.0005	Pengadaan Mebel													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PRO- GRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PRO- GRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR- GET AKHIR PERI- ODE RENST RA OPD	REAL- ISASI CA- PAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRA- KIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TA- HUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KE- LOMPO K SASA- RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							TAR- GET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR- GET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NA- SIONA L	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				59 Unit	12.829.200,00	Kab. De- mak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-		101.000.000,00
	2.16.01.2. 07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				17 Unit	10.000.000,00	Kab. De- mak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-		120.000.000,00
	2.16.01.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Uru- san Yang Tersedia	-			10 Lapor an	1.502.500.000,00			-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	-	1.502.500.000,00
	2.16.01.2. 08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Su- rat Menyurat				6 Lapor an	2.500.000,00	Kab. De- mak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-		2.500.000,00
	2.16.01.2. 08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PRO- GRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PRO- GRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR- GET AKHIR PERI- ODE RENST RA OPD	REAL- ISASI CA- PAIAN RENJA OPD TA- HUN 2022	PRA- KIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TA- HUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KE- LOMPO K SASA- RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							TAR- GET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR- GET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NA- SIONA L	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dise- diakan				4 Lapor an	1.500.000.000,00	Kab. De- mak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-		1.500.000.000,00
	2.16.01.2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penun- jang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpelihara	-			54 Unit	215.289.880,00			-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	-	602.500.000,00
	2.16.01.2. 09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeli- hara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	39.950.000,00	Kab. De- mak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-		42.500.000,00
	2.16.01.2. 09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Di- nas Operasional atau Lapangan yang Dipeli- hara dan dibayarkan Pajak dan Perizi- nannya				13 Unit	85.957.000,00	Kab. De- mak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-		110.000.000,00
	2.16.01.2. 09.0005	Pemeliharaan Mebel													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PRO- GRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PRO- GRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR- GET AKHIR PERI- ODE RENST RA OPD	REAL- ISASI CA- PAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRA- KIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TA- HUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KE- LOMPO K SASA- RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							TAR- GET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR- GET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NA- SIONA L	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				15 Unit	3.437.880,00	Kab. De- mak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-		20.000.000,00
	2.16.01.2. 09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	14.200.000,00	Kab. De- mak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-		27.500.000,00
	2.16.01.2. 09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kan- tor dan Bangunan Lainnya yang Dipeli- hara/Direhabilitasi				3 Unit	29.294.800,00	Kab. De- mak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-		110.000.000,00
	2.16.01.2. 09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipeli- hara/Direhabilitasi				37 Unit	17.680.000,00	Kab. De- mak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-		42.500.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PRO- GRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PRO- GRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR- GET AKHIR PERI- ODE RENST RA OPD	REAL- ISASI CA- PAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRA- KIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TA- HUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KE- LOMPO K SASA- RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
							TAR- GET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR- GET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NA- SIONA L	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.16.01.2. 09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	24.770.200,00	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-		250.000.000,00
	-	-						4.144.675.000,00							3.999.799.492,00
	2.16.01.2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Keuangan</i>	-			78 Dokumen	4.144.675.000,00			-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-	-	3.999.799.492,00
	2.16.01.2. 02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				34 Orang/bulan	4.144.675.000,00	Kab. Demak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	-		3.999.799.492,00
	J U M L A H							9.032.164.600,00							11.637.673.492,00

4.2 Program Prioritas dan Rencana Implementasi

Dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak Tahun 2021 – 2026 melaksanakan Rencana Program dan kegiatan prioritas mengacu pada program prioritas Bupati Demak Tahun 2024 sbb :

1. Prioritas program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis “SMART CITY”, dengan indikator program integrasi aplikasi e-government dan Pengembangan Single Database (Kebijakan Satu Data) menjadi leading sektor Dinas Komunikasi dan Informatika sedangkan yang sifatnya supporting adalah kegiatan Papperless Office (Administrasi Kantor Hemat Kertas) dan Digitalisasi Desa, suport jaringan pada Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM), serta support jaringan pada kegiatan pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP).
2. Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan, Dinkominfo mensupport jaringan dan mendukung keberhasilan pada indikator Literasi Berbasis Inklusi Social, pembangunan taman-taman Baca Integrative dan Percepatan Penanganan Covid-19 dan Stunting
3. Percepatan Pemulihan Ekonomi Masyarakat bersama dengan dinas terkait, Dinkominfo mensupport jaringan dan mendukung kegiatan Pelatihan Start Up Wirausaha Muda.

Adapun program prioritas yang dilaksanakan oleh Dinkominfo pada Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis “SMART CITY”, Secara Rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program prioritas pada Renstra 2021-2026 dan Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika untuk pencapaian program integrasi aplikasi e-government tahun 2022 belum ditargetkan tetapi tercapai 4 Kluster dengan anggaran Rp.0 ,- dan Tahun 2023 Target 3 kluster dan pada Semester 1 sudah tercapai 5 kluster sudah tercapai 9 kluster 100 % (target akhir RPJMD Tahun 2026)
2. Program prioritas Pengembangan Single Database (Kebijakan Satu Data) indikator Jumlah data dalam Satu Data yang memiliki metadata target 802 data dengan anggaran

3. Penyusunan Renja untuk tahun 2024 berdasarkan hasil desk dengan Bappelitbangda, bahwa untuk program prioritas tidak mendapatkan alokasi anggaran karena merupakan kegiatan yang melekat pada program kegiatan rutin bidang urusan kominfo, statistik dan persandian.
4. Dalam upaya perwujudan dan implementasi pencapaian kinerja program prioritas diutamakan untuk pengembangan-pengembangan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis “SMART CITY lebih fokus pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
5. Dalam Pengembangan program prioritas Dinas Komunikasi dan informatika berkolaborasi dengan bidang urusan kominfo, statistik dan persandian serta pihak-pihak terkait baik instansi horisontal maupun vertikal.

Adapun rumusan rencana program prioritas sebagai berikut :

Tabel 4.2.

Rumusan Rencana Program Prioritas dan Rencana Implementasi Tahun 2024

NO	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	Indikator	Satuan	Data awal (2020)	REALISASI s.d 2022		PROYEKSI 2023		TARGET 2024		TARGET AKHIR RENSTRA (2026)	Kode Subkegiatan	Ket.
					Realisasi Kinerja	Realisasi anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					824	18.010.000	703	220.000.000		-			
I	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Smart City'				824	18.010.000	703	220.000.000	4	-			
a	Integrasi <i>e-government</i>	Jumlah kluster data yang terintegrasi	Kluster	-	4	-	3	100.000.000	2	-	2		
1	Integrasi aplikasi kluster Kesehatan	Jumlah Aplikasi dalam kluster kesehatan	Unit	-	1	-	1	40.000.000	-	-	-	2.16.03.2.02.07	
2	Integrasi aplikasi kluster Kondisi Makro	Jumlah Aplikasi dalam kluster ekonomi makro	Unit	-	-	-	1	30.000.000	-	-	-	2.16.03.2.02.07	
3	Integrasi aplikasi kluster Keuangan Daerah	Jumlah Aplikasi dalam kluster keuangan daerah	Unit	-	1	-	1	30.000.000	-	-	-	2.16.03.2.02.07	
4	Integrasi aplikasi kluster Kesejahteraan	Jumlah Aplikasi dalam kluster kesejahteraan	Unit	-	1	-	-	-	1	-	-	2.16.03.2.02.07	
5	Integrasi aplikasi kluster Ekonomi Wilayah	Jumlah Aplikasi dalam kluster ekonomi wilayah	Unit	-	-	-	-	-	1	-	-	2.16.03.2.02.07	
6	Integrasi aplikasi kluster Pendidikan	Jumlah Aplikasi dalam kluster Pendidikan	Unit	-	1		-	-	-	-	-		
7	Integrasi aplikasi kluster Perumahan	Jumlah Aplikasi dalam kluster Perumahan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-		

NO	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	Indikator	Satuan	Data awal (2020)	REALISASI s.d 2022		PROYEKSI 2023		TARGET 2024		TARGET AKHIR RENSTRA (2026)	Kode Subkegiatan	Ket.
					Realisasi Kinerja	Realisasi anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	Integrasi aplikasi kluster Infrastruktur	Jumlah Aplikasi dalam kluster Infrastruktur	Unit	-	-	-	-	-	-	-	1		
9	Integrasi aplikasi kluster TIK	Jumlah Aplikasi dalam kluster TIK	Unit	-	-	-	-	-	-	-	1		
e	Pengembangan <i>single database</i> (kebijakan satu data)	Jumlah data dalam Satu Data yang memiliki metadata	data	500	820	18.010.000	700	120.000.000	800	-	1.000		
1	Pengolahan data	Jumlah data dalam metadata yang di-analis	data	-	820	18.010.000	700	40.000.000	800	-	1.000	2.20.02.2.01.03	
2	Pelatihan / Bimtek	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan	orang	-	84	-	84	40.000.000	-	-	-		
3	Penyusunan database sipd	Jumlah database yang disusun	data	-	1	-	1	40.000.000	-	-	-		
4	peningkatan kapasitas admin database	Jumlah admin yang dilatih	orang	-	41	-	-	-	41	-	-		
5	Pengembangan aplikasi satu database	jumlah aplikasi yang dikembangkan	aplikasi	-	1	-		-	-	-	1		

BAB V.

PENUTUP

5.1. Catatan Penting

Rencana Kerja Dnas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak tahun 2024 disusun dengan melakukan pemetaan program dan kegiatan sesuai klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Dalam Renja Tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika terdapat 5 Program, 11 kegiatan dan 29 Sub Kegiatan. Pagu perubahan anggaran sebesar Rp. 7.803.723.303,- terealisasi Rp, 7.560.284.069,- (96,88 %) ada beberapa penambahan pekerjaan yang tersebar pada program-program teknis

Antara lain :

- 1 Belanja Jasa Advertorial Media Cetak
- 2 Belanja Jasa Advertorial Media Cetak
- 3 Pengadaan Aplikasi Cengkeraman Mata Elang (CME)
5. Jasa Konsultasi Proses Bisnis (SPBE)
6. Sosialisasi DBHCHT (bidang penegakan hukum)
7. Biaya Listrik dan internet

Pada Renja tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika juga mengampu program unggulan Bupati “Peningkatan Tata Kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik berbasis 'smart city” didukung dengan kegiatan Integrasi e-government dan Pengembangan single database (kebijakan satu data) di tahun 2021-2026 ada beberapa target-target di tahun 2024 yang harus tercapai.

5.2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak tahun 2024 merupakan Perencanaan tahun 2023 untuk mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pem-

bangunan daerah, prasyarat dokumen perencanaan ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya.

Setelah adanya pergeseran anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten tahun 2022. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak berpedoman pada :

1. Rencana Kerja tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Demak.
2. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2022 sampai dengan semester II dan evaluasi Kegiatan Tahun 2023 semester 1
3. Usulan program bidang urusan komunikasi dan informasi, bidang urusan statistik dan bidang urusan persandian dalam perumusan kegiatan dan sub kegiatan dalam Rencana Kerja guna mengakomodir usulan bidang yang selaras dengan program prioritas.

5.3. Rencana tindak lanjut.

Guna Meningkatkan Pelayanan Publik , akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, dan meningkatkan Kinerja Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Mendukung Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah, melalui penyelenggaraan Perencanaan yang bersih, akuntabel, aspiratif, partisipatif, dan transparan, maka Dinas Komunikasi dan Informatika diharapkan untuk:

1. Bekerja keras serta berbenah diri, meningkatkan kemampuan personil, koordinasi dan kerjasama dalam mewujudkan hasil kerja yang lebih optimal;
2. Responsif terhadap organisasi, dalam arti tidak hanya puas dengan menyelesaikan tugas pokok dan fungsinya, tetapi juga memberikan kontribusi serta memiliki pandangan yang lebih luas dan jernih tentang berbagai aspek, dalam lintas bidang dan organisasi;
3. Bekerja secara proaktif, didasari penelaahan secara mendalam dalam upaya menghindari kesalahan dalam menjalankan kegiatan organisasi;

4. Mencermati berbagai peristiwa aktual, kemudian melakukan analisis secara mendalam untuk mempersiapkan langkah-langkah ke depan dan
5. Menyatukan segala potensi yang ada dari berbagai disiplin ilmu untuk secara bersama-sama menyelesaikan bidang tugas organisasi.

Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan sebagai landasan, pedoman dan acuan penyusunan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2024.

LAMPIRAN : 1 BERITA ACARA HASIL PENYESUAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN BESERTA INDIKATORNY.
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021-2026
DENGAN KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSA
5889 TAHUN 2021 TENTANG HASIL VERIFIKASI, VALIDASI DAN INVENTARISASI PEMUTAKHIRAN KLASIF.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH
NOMOR :
TANGGAL : 2023

**HASIL PENYESUAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN BESERTA INDIKATORNYA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
DEMAK TAHUN 2021-2026
DENGAN KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
050-5889 TAHUN 2021 TENTANG HASIL VERIFIKASI, VALIDASI DAN INVENTARISASI PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMEN-
KLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH**

SEMULA								MENJADI									
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABU- PATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATU AN	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABU- PATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATU AN
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DA- SAR			
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMU- NIKASI DAN INFORMATIKA				2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABU- PATEN/KOTA		Persentase rekomen- dasi hasil monitor- ing dan evaluasi Perangkat yang ditindaklanjuti	%	2	16	01				Persentase rekomen- dasi hasil monitor- ing dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti		%
							Persentase Pela- yanan sesuai Standar Pelayanan	%	2	16	01				Persentase pela- yanan sesuai standar pelayanan		%
2	16	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja dae- rah	Doku- men	2	16	01	2.01			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja dae- rah		Doku- men

SEMULA									MENJADI								
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2	16	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen
2	16	01	201	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	16	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen
2	16	01	201	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	16	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Tersedianya Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen
2	16	01	201	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	16	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen
2	16	01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan

SEMULA									MENJADI								
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2	16	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah kebutuhan administrasi keuangan perangkat Daerah	Orang	2	16	01	2.02			Jumlah Laporan Keuangan		Orang
2	16	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang /bulan	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang /bulan
2	16	01	202	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	2	16	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas AS	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen
2	16	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Terpenuhinya kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Orang/Buah/Kegiatan)	2	16	01	2.05			Administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi		Orang /Bua h/Keg iatan)
2	16	01	205	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	16	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket
2	16	01	205	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	16	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang
2	16	01	205	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	2	16	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undanga	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	Orang
2	16	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah kebutuhan administrasi umum Perangkat Daerah	Unit/dos/OK	2	16	01	2.06			Administrasi umum Perangkat Daerah yang terpenuhi		Unit/dos/OK

SEMULA									MENJADI								
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2	16	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket
2	16	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket
2	16	01	206	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	16	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket
2	16	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket
2	16	01	206	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket
2	16	01	206	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	2	16	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan
2	16	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan
2	16	01	206	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	16	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen

SEMULA								MENJADI									
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2	16	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah	unit	2	16	01	2.07			Jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah		unit
2	16	01	207	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	16	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit
2	16	01	207	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	2	16	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Tersediannya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit
2	16	01	207	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	16	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit
2	16	01	207	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	16	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit
2	16	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah	Unit	2	16	01	2.08			Jasa Penunjang Urusan Yang Tersedia		Unit
2	16	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyura	Laporan

SEMULA									MENJADI								
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2	16	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan
2	16	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah terpeliharanya BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	Unit	2	16	01	2.09			Jumlah BMD yang terpelihara		Unit
2	16	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit
2	16	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit
2	16	01	209	05	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	2	16	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit
2	16	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit

SEMULA									MENJADI								
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2	16	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit
2	16	01	209	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	16	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit
2	16	01	209	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	16	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA												
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Tingkat Jawa Tengah	Angka	2	16	02				Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Tingkat Jawa Tengah		Angka
2	16	02	201		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Layanan Komunikasi dan informasi publik yang dikelola	Layanan	2	16	02	2.01			Jumlah Layanan Komunikasi dan informasi publik yang dikelola		Layanan

SEMULA									MENJADI								
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2	16	02	201	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	2	16	02	2.01	0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen
2	16	02	201	06	Pelayanan Informasi Publik	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	2	16	02	2.01	0006	Pelayanan Informasi Publik	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen
2	16	02	201	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Terlaksananya Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Dokumen	2	16	02	2.01	0011	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Terlaksananya Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Dokumen
2	16	02	201	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Terlaksananya Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Dokumen	2	16	02	2.01	0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Terlaksananya Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Dokumen
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		Persentase aplikasi e-gov yang terintegrasi dengan portal Daerah	%	2	16	03				Persentase aplikasi e-gov yang terintegrasi dengan portal Daerah		%
2	16	03	201		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah	OPD	2	16	03	2.01			Jumlah perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah		OPD
2	16	03	201	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	2	16	03	2.01	0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit

SEMULA								MENJADI									
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2	16	03	202		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah aplikasi yang telah terintegrasi	Unit	2	16	03	2.02			Jumlah aplikasi yang telah terintegrasi		Unit
2	16	03	202	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terlaksananya Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dokumen	2	16	03	2.02	0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terlaksananya Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dokumen
2	16	03	202	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terlaksananya Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	2	16	03	2.02	0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terlaksananya Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit
2	16	03	202	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Layanan	2	16	03	2.02	0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Layanan
2	16	03	202	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Terlaksananya Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Dokumen	2	16	03	2.02	0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Terlaksananya Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Dokumen

SEMULA									MENJADI								
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2	16	03	202	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	2	16	03	2.02	0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen
2	16	03	202	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Terlaksananya Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Dokumen	2	16	03	2.02	0011	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Terlaksananya Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Dokumen
2	16	03	202	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Dokumen	2	16	03	2.02	0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Dokumen
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK												
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Tingkat Ketersediaan Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi	%	2	20	02				Tingkat Ketersediaan Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi		%
2	20	02	201		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah data dalam Satu Data yang memiliki metadata	Data	2	20	02	2.01			Jumlah data dalam Satu Data yang memiliki metadata		Data
2	20	02	201	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan,	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan,	Dokumen	2	20	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan,	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan,	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan,	Dokumen

SEMULA									MENJADI								
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
					Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Diseminasi Data Statistik Sektoral	Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral							Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	
2	20	02	201	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Meningkatnya Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Orang	2	20	02	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Meningkatnya Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Orang
2	20	02	201	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Terbangunnya Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	2	20	02	2.01	0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Terbangunnya Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen
2	20	02	201	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	Orang	2	20	02	2.01	0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	Orang
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PER-SANDIAN												
2	21	02			PROGRAM PENYELENG-GARAAN PER-SANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	2	16	03				Tingkat keamanan informasi pemerintah		%

SEMULA									MENJADI								
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2	21	02	201		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah	Laporan	2	16	03	2.02			Jumlah laporan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah		Laporan
2	21	02	201	02	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dokumen	2	16	03	2.02	0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terlaksananya Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dokumen
2	21	02	201	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan
2	21	02	201	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Keamanan Informasi untuk Perangkat Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	2	21	02	2.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Keamanan Informasi untuk Perangkat Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah